

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era otonomi daerah terjadi perubahan transformasi paradigma akuntabilitas vertikal menjadi akuntabilitas kepada masyarakat di daerah. Peran pemerintah daerah sangat menyentuh kehidupan masyarakat, bahkan sering layanan yang merupakan produk pemerintah daerah tersebut juga menyangkut kualitas hidup masyarakat dan hasil yang dicapainya menunjukkan tingkat peradaban masyarakat. Masyarakat terus berkembang dengan segenap tuntutannya, demikian juga pemerintah daerah, hal ini berimplikasi pada kompleksitas layanan yang semakin tinggi dan membawa pada suatu implikasi lanjutan terhadap tuntutan peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (Sari, 2020:1).

Hasil kerja instansi pemerintah dalam rangka implementasi urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya dapat diketahui melalui informasi tentang akuntabilitas kinerja masing-masing instansi pemerintah tersebut. Informasi tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dibutuhkan oleh pemerintah karena berdasarkan informasi tersebut, pemerintah mempunyai bahan pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan-perbaikan manajemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang lebih baik lagi maka dari itu pemerintah memerlukan instansi pemerintah yang memiliki kinerja yang baik terutama dalam bentuk akuntabilitas instansi pemerintahan.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bagian isu kebijakan yang strategis di Indonesia saat ini karena perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdampak pada upaya terciptanya *good governance*. Perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga berdampak luas pada bidang ekonomi dan politik (Agus Dwiyant dalam Santoso, 2018:15). Sedangkan *fraud* merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan penuh kesadaran, bukan karena kelalaian atau ketidaktahuan, untuk mendapatkan manfaat finansial dengan cara berbuat curang (Kristiyani dan Hamidah, 2020:294). Peningkatan kinerja instansi pemerintah dalam bidang akuntansi dan pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan cara menerapkan akuntansi sektor publik dan sistem pengendalian internal dalam suatu instansi pemerintah.

Akuntansi sektor publik adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan pemerintah yang dimaksud dapat mencakup pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota (Halim, 2014:20). Sedangkan sistem pengendalian internal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan salah satu Dinas yang berfungsi membantu urusan pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu khususnya mengenai pelayanan berkenaan tentang perizinan serta penanaman modal yang ada di suatu daerah. Dalam bekerja pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu sudah menerapkan akuntansi sektor publik dalam sistem keuangan daerahnya akan tetapi hal ini masih belum dilakukan secara maksimal seperti halnya laporan keuangan daerah tidak dipublikasikan sehingga terlihat tidak transparansi.

Selain itu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bahwa sistem pengendalian internal saat ini sudah cukup baik hanya saja dalam bekerja masih terdapat beberapa pegawai yang lambat melayani masyarakat sehingga dibutuhkan evaluasi kembali dalam pengendalian internal suatu organisasi. Berdasarkan permasalahan hal tersebut diatas jika tidak segera dibenahi maka akan dapat menyebabkan menurunnya kinerja pegawai atau instansi pemerintah dengan ini akan dapat menyebabkan terjadinya *fraud* dalam suatu organisasi. Berdasarkan uraian diatas maka penulis melakukan penelitian Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu).

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah ada pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan sistem pengendalian

internal terhadap Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu) baik secara parsial maupun simultan.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan sistem pengendalian internal terhadap Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu) baik secara parsial maupun simultan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terkait, antara lain :

a. Secara Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pemikiran terhadap ilmu pengetahuan tentang pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan sistem pengendalian internal terhadap Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya dengan mengembangkan penelitian yang sudah saya teliti sebelumnya.

b. Secara Praktis

1) Bagi Peneliti

Hasil penulisan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan penerapan akuntansi sektor publik, sistem pengendalian internal, akuntansi kinerja instansi pemerintah.

2) Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap bidang ilmu pengetahuan serta dapat memberikan referensi bagi mahasiswa lain.

3) Bagi Tempat Penelitian

Hasil yang diharapkan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan menggunakan variabel penerapan akuntansi sektor publik dan sistem pengendalian internal terhadap akuntansi kinerja instansi pemerintah.